BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Permasalahan mengenai ketidakandalan dan ketidaktepatwaktuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Indonesia masih menjadi permasalahan yang perlu dikaji lebih dalam. Hal ini merupakan bukti bahwa masih rendahnya sistem pengendalian intern pemerintah dan pemanfaatan teknologi informasi yang dimiliki pegawai/staf sehingga dapat memberikan dampak yang tidak baik terhadap nilai informasi dari suatu laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dibuktikan dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LKPD tahun 2018 yaitu masih banyak terdapat permasalahan yang timbul akibat masih lemahnya sistem pengendalian intern dan ketidakandalan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah (Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK semester I, Tahun 2018).

Menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 mengenai Pemerintah Daerah ditetapkan bahwa pemerintah daerah adalah “penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah telah ditetapkan adanya pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan daerah. Ketika diberlakukannya kedua undang-undang tersebut, sistem pembangunan berubah dari otonomi pusat menjadi otonomi daerah. Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah dapat mengelola keuangan daerah secara transparan, akuntabel, serta dapat memanfaatkan dan mengelola sumber daya yang ada di daerahnya sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa “otonomi daerah merupakan kewenangan suatu daerah untuk

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pemerintah daerah merupakan entitas pelaporan yang salah satu bentuk pertanggungjawabannya adalah dengan membuat laporan keuangan yang berkualitas. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 disebutkan dalam kerangka konseptual, bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Pelaporan keuangan pemerintah bertujuan menyajikan informasi yang berguna bagi para pengguna dalam mengukur akuntabilitas dan menetapkan suatu keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban dan untuk menjawab serta menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif dalam suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Maka dari itu, pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang terkandung didalam suatu laporan keuangan pemerintah daerah. Tuntutan publik mengenai kualitas dari suatu laporan keuangan pemerintah daerah yang baik, memerlukan adanya perubahan paradigma dan prinsip-prinsip manajemen keuangan daerah, baik pada tahap penganggaran, implementasi, maupun pertanggungjawaban. Oleh karena itu, pemegang amanah harus mempertanggungjawabkan atas segala kegiatannya kepada masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, informasi dalam Laporan Keuangan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi keuangan dari semua aspek ataupun dalam hal ini kelompok pengguna seperti investor, masyarakat dan juga pemerintah. Proses pelaporan keuangan pada pemerintah daerah dilakukan dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang sudah ditetapkan. Setelah disesuaikan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya laporan keuangan daerah harus diaudit dan dalam hal ini diaudit oleh BPK. Laporan keuangan pemerintah daerah kemudian

akan disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan keuangan pemerintah daerah yang dimaksud adalah Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan diaudit untuk memeriksa salah satunya apakah laporan keuangan sudah disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan atau belum. Menggambarkan aktivitas pemerintah yang dituangkan di dalam laporan keuangan merupakan upaya transparansi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan akuntabilitas yang berupa keterbukaan pemerintah dalam mengelola sumber daya publik, agar masyarakat dapat mengukur kinerja pemerintah. Penilaian apakah suatu laporan keuangan yang disajikan pemerintah telah diungkapkan dengan wajar atau tidak yaitu dengan melihat hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI setiap tahunnya. Ada 4 (empat) opini yang diberikan, yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Opini tertinggi yang mengindikasikan bahwa laporan keuangan telah disusun secara wajar dan berkualitas adalah opini WTP.

Opini WTP atas laporan keuangan dapat meningkatkan kepercayaan untuk meyakini informasi yang tercantum didalam LKPD tersebut. Pemberian opini BPK RI, khususnya opini WTP diungkapkan oleh Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani bermanfaat dalam menggambarkan kesesuaian pengelolaan keuangan dengan tata kelola terhadap ketentuan perundang-undangan. Selain itu kepercayaan publik termasuk investor kepada pemerintah daerah akan semakin meningkat sehingga dapat mendorong percepatan pembangunam terutama pada sektor prioritas daerah dan menjadi pemicu bagi pemerintah untuk terus meningkatkan pengelolaan anggaran serta manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat (www.antaraneews.com, 2017; 3/06/2019).

Pemerintah Kota Palembang merupakan satu-satunya pemerintah daerah dalam lingkup Provinsi Sumatera Selatan yang mendapat opini WTP sembilan kali berturut-turut terhitung sejak tahun pelaporan 2010 hingga 2018. Berita ini disampaikan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sumsel Teguh Prasetya

mengungkapkan bahwa: “faktor utamanya karena komitmen Pemerintah Daerah, dalam hal ini Walikota Palembang dalam hal pengelolaan keuangan, sehingga tidak ada temuan dalam pemeriksaan laporan keuangan khususnya temuan material, walaupun ada hanya sebatas administrasi”. (www.bisnis.com, 2019; 3/07/2019). Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Palembang Tahun 2017, “faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran tersebut adalah karena dengan meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, seperti adanya aturan mengenai pelaporan gratifikasi, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN), dan pelaksanaan pelayanan perijinan secara terpadu”. “Opini WTP yang diraih oleh pemerintah kota Palembang membuktikan bahwa pengelolaan anggaran pemerintah kota Palembang sangat baik dan transparan serta sesuai prosedur yang baik oleh pejabat pemerintah yang baik pula”. (<http://www.palembang.go.id>; 2018/Maret/09).

Informasi tersebut juga didukung dengan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD tahun 2010 hingga 2018 untuk Kota Palembang berikut ini:

Tabel 1.1
Daftar Opini BPK di Kota Palembang

No	Keterangan	Opini
1	Tahun 2010	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2	Tahun 2011	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
3	Tahun 2012	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
4	Tahun 2013	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
5	Tahun 2014	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
6	Tahun 2015	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
7	Tahun 2016	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
8	Tahun 2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
9	Tahun 2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber: Data yang diolah dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI, 2019

Dari tabel 1.1 diatas, dapat diketahui bahwa Pemerintah Kota Palembang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara konsisten yakni sejak tahun 2010-2018. Opini WTP yang diperoleh Kota Palembang selama 9 (sembilan) tahun berturut-turut dari BPK RI menjadi fenomena yang sangat menarik perhatian penulis untuk meneliti ulang faktor apakah yang mempengaruhi nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Palembang Tahun 2017, faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran tersebut adalah karena dengan meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, seperti adanya aturan mengenai pelaporan gratifikasi, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN), dan pelaksanaan pelayanan perijinan secara terpadu.

Ada beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah, seperti penelitian Rifandi (2018) dan Dewi (2015). Hasil penelitian Rifandi menyatakan bahwa terdapat pengaruh variabel pemanfaatan teknologi informasi terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta. Hasil penelitian Dewi membuktikan terdapat pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah Kabupaten Buleleng.

Faktor pertama yang mempengaruhi nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah yaitu penerapan sistem pengendalian intern pemerintah yang memadai, dimana berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyatakan bahwa “sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yaitu sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah”. Pengawasan intern meliputi keseluruhan dari proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan aktivitas pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilakukan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditentukan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik. Menteri/pimpinan lembaga, gubernut, dan bupati/walikota wajib melaksanakan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah agar pengelolaan keuangan negara menjadi efektif, efisien, transparan dan akuntabel

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, tujuan SPIP adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai agar tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan

pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri atas beberapa unsur yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern. Pengendalian intern meliputi berbagai kebijakan yaitu terkait dengan catatan keuangan, memberikan keyakinan yang memadai atas keamanan aset yang berdampak material pada laporan keuangan pemerintah. Jika penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berjalan dengan baik, maka laporan keuangan yang dihasilkan akan mempunyai nilai informasi yang baik pula. Sebaliknya, jika penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tidak berjalan dengan baik, maka ada kemungkinan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan tidak mempunyai nilai informasi yang baik.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI atas 542 LKPD ditemukan 6.222 kelemahan SPI yang terdiri atas 2.083 permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 2.887 permasalahan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan belanja, dan 1.252 permasalahan kelemahan struktur pengendalian intern (IHPS I, 2018).

Selain itu, faktor kedua yang mempengaruhi nilai informasi laporan keuangan suatu pemerintah daerah adalah pemanfaatan teknologi informasi secara maksimal dan memadai. Pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku atau sikap seseorang menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerjanya. Secara umum, pemanfaatan teknologi akan memberikan dampak positif karena memberikan kemudahan dan efisiensi waktu dan biaya. Jadi, jika teknologi informasi dimanfaatkan secara optimal dan memberikan pengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah (Argo, 2015). Perkembangan teknologi informasi sangat cepat dari masa ke masa, maka dipandang perlu pemerintah daerah memanfaatkan perkembangan tersebut untuk membantu penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sesuai ketentuan yang ada. Pemanfaatan teknologi informasi yang dimaksud mencakup pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan serta pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar

pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negeri ini. Hal ini bertujuan agar proses penyusunan suatu laporan keuangan lebih terarah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah menyatakan bahwa suatu sistem informasi keuangan daerah ditetapkan dalam rangka untuk menunjang perumusan kebijakan fiskal secara nasional serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan desentralisasi. Dalam rangka mendukung percepatan penyampaian informasi keuangan daerah dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, sistem informasi keuangan daerah diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk lebih cepat dan tepat waktu dalam melakukan penyusunan APBD dan pelaporan keuangan daerah sehingga dapat terciptanya kepastian hukum.

Ketua BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Maman Abdul Rahman mengatakan BPK saat ini telah menerima semua LKPD. Dari 11 Kabupaten Kota yang menyerahkan laporan termasuk Provinsi Sumatera Selatan, Palembang merupakan salah satu dari 7 daerah di Provinsi Sumatera Selatan yang telah menyerahkan laporan lebih awal pada bulan Januari dan Februari. (<http://www.rmolsumsel.com/2018/03/29>).

Nilai informasi adalah kemampuan informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keyakinan pemakai dalam pengambilan keputusan. Suatu informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai. Oleh sebab itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan dalam hal perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah daerah akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Maka, informasi yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai. Informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut memiliki nilai yaitu keterandalan dan ketepatanwaktuan.

Keterandalan dan ketepatan waktu merupakan dua unsur informasi yang sangat penting dengan pengambilan keputusan berbagai pihak. Keterandalan merupakan kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Ketepatan waktu adalah tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan (Mamduh M.H, 2012 dalam Sari (2016). Akan tetapi dalam mengimplementasikan teknologi informasi ini tidaklah murah. Apalagi jika teknologi informasi yang ada, tidak atau belum mampu dimanfaatkan secara maksimal, maka implementasi dari teknologi informasi akan menjadi sia-sia dan mahal. Masalah penerapan teknologi informasi antara lain berkaitan dengan kondisi perangkat keras, perangkat lunak, pemutakhiran data, kondisi sumber daya manusia yang ada, serta keterbatasan dana. Hal ini dapat menjadi persoalan serius dan berpengaruh terhadap keandalan dan ketepatan waktu suatu laporan keuangan pemerintah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, kendala informasi relevan dan andal merupakan salah satu persoalan yang banyak terjadi. Relevan artinya apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Salah satu kriteria informasi yang relevan adalah tepat waktu. Informasi harus disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan. Sedangkan andal artinya informasi dalam laporan keuangan bebas dari kata yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.

“Berdasarkan revidu, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan kinerja ini”. (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palembang Tahun 2017).

Berdasarkan paparan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ulang tentang pelaporan keuangan. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada objek yang diteliti, waktu dan tempat

yang berbeda. Penulis berkeinginan untuk meneliti yang didasarkan pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi sekaligus menuangkannya dalam skripsi dengan judul “**Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang**”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini antara lain:

1. Apakah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh secara parsial terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang?
2. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh secara parsial terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang?
3. Apakah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh secara simultan terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini terfokus, tidak meluas, dan tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan pada penelitian ini. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah pembahasan mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang.

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kota Palembang dengan objek penelitian pada Organisasi Perangkat Daerah di Kota Palembang. Pengambilan data dilakukan selama bulan Maret hingga Juni 2019.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.4.1 Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian sesuai dengan permasalahan yang peneliti kemukakan adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara parsial terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang
2. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi secara parsial terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang
3. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi secara simultan terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang

1.4.2 Manfaat Penulisan

Penelitian yang dilakukan penulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:

1. Penelitian ini diharapkan dapat membuktikan faktor mana yang paling mempengaruhi nilai informasi laporan keuangan Pemerintah Kota Palembang, diantara kedua faktor yang diteliti yaitu sistem pengendalian intern pemerintah dan pemanfaatan teknologi informasi, sehingga pemerintah dapat memberikan perhatian lebih akan hal tersebut agar laporan keuangan Pemerintah Kota Palembang dapat menjadi lebih berkualitas.
2. Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pihak-pihak terkait terutama bagi Pemerintah Kota Palembang khususnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kota Palembang, sehingga dapat menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah dengan baik, dan senantiasa memanfaatkan teknologi informasi dengan semaksimal mungkin guna menghasilkan laporan keuangan yang memiliki nilai andal dan tepat waktu bagi pengguna laporan keuangan pemerintah dalam pengambilan keputusan.